

ANALISIS PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN LONGSOR (STUDI KASUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LEREP KABUPATEN SEMARANG).

Ratih Ayu Tirta Anggalih

Ratihanggalih25@gmail.com

Mahasiswi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Dr. Dra. Kushandajani, M.S.

Ningkisworo123@gmail.com

Dosen Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Abstrak

Dalam mengelola pembangunan desa setiap pemerintah desa mengupayakan peningkatan terhadap kinerja pembangunan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam menunjang peningkatan kinerja pembangunan perlu ditunjang dengan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi yang disusun oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan desa, dimana pemerintah juga melibatkan sektor swasta dan kelompok masyarakat didalamnya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dengan prosentase kehadiran hingga 80% dalam kegiatan musrenbang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses perencanaan partisipatif pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan apa faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat pada proyek pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kabupaten Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian, dan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen notulensi usulan masyarakat desa, jurnal-jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, berita di media cetak, media elektronik atau online. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa pertimbangan dalam perencanaan partisipatif yaitu (1) Mengumpulkan informasi; (2) Menyalurkan aspirasi masyarakat; (3) Diversivitas proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat dan sivitas lainnya turut serta berpartisipasi dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung diantaranya: koordinasi yang baik antar warga dengan perangkat desa, keaktifan masyarakat, tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam gotong-royong dan adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: jangkauan wilayah yang sangat luas, kesibukan masyarakat dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Pemerintah Desa Lerep diharapkan terus meningkatkan keterbukaan dalam bentuk komunikasi dua arah kepada masyarakat, harus lebih berupaya untuk merangsang dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan sivitas lainnya.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Perencanaan pembangunan.

ANALYSIS OF PARTICIPATORY PLANNING FOR THE CONSTRUCTION OF A MUDFLOW RETAINING SLOPE (CASE STUDY OF DEVELOPMENT PLANNING IN THE VILLAGE OF LEREP, SEMARANG REGENCY)

Ratih Ayu Tirta Anggalih

Ratihanggalih25@gmail.com

Student of Government Science, Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Semarang

Dr. Dra. Kushandajani, M.S.

Ningkisworo123@gmail.com

Lecturer of Government Science, Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Science, Diponegoro University, Semarang

ABSTRACT

In managing village development, each village government strives to improve development performance so that it can affect the welfare of the community. Therefore, in supporting development improvement performance needs to be supported by good development planning. Development planning is one of the strategies compiled by the village government in planning and managing village development, in which the government also engages the private sector and community groups in it, so that the implementation of regional development can be carried out properly and can realize the regionally planned vision and mission. This is supported by a high level of community participation with a percentage of attendance of up to 80% in musrenbang activities. The formulation of the problem in this research is how the participatory planning process of building a mudslide retaining slope in Lerep Village, Ungaran Barat Subdistrict, Semarang Regency and what are the inhibiting factors and factors that encourage community participation in the mudsliding retarding talud development project in Lerep Village, Semarang Regency.

This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. In this study, primary data obtained through direct interviews with informants determined from the linkage of the informants with research problems, and secondary data obtained from documentations of village community proposals, journals, articles, laws and regulations, news in print media , electronic or online media. While the data analysis in this study uses several considerations in partitionative planning, namely (1) Gathering information; (2) Channeling community aspirations; (3) Diversity of the decision making process.

The results of this study indicate that overall community participation in infrastructure development planning can be said to be good. This is because the community and other community members participate in every stage of development planning. In this study found several supporting factors including: good coordination between residents and village officials, community activity, high levels of community awareness in mutual cooperation and the existence of controls carried out by the community. While the inhibiting factors include: a very wide area coverage, busy people and the lack of adequate facilities.

Lerep Village Government is expected to continue to increase openness in the form of two-way communication to the community, should make more efforts to stimulate and optimize community involvement and other community members.

Keywords: Community participation, Development planning.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi tonggak baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Desa yang sebelumnya tidak dikenal di dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan tentang tata pemerintahan di Indonesia, berubah menjadi unit pemerintahan terkecil yang mempunyai legalitas dan legitimasi formal sebagaimana halnya pemerintah kabupaten/kota atau provinsi yang berada di atasnya. Hal itu berimplikasi pada kemandirian desa dalam menetapkan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan di daerahnya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 UU Desa. Pasal 78 ayat (2) UU Desa menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

Rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan untuk mengatur agar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada desa itu dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Dengan berlakunya program pemerintah dalam rangka memberikan dana bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) kepada tiap-tiap desa melalui perangkat desa membuat desa semakin berkembang dalam meningkatkan pembangunan desa.

Salah satu yang mendapatkan alokasi dana desa adalah Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Lerep merupakan salah satu desa wisata favorit di Jawa Tengah. Desa ini memiliki alam yang mempesona dengan pemandangan Gunung Ungaran. Namun, meski Desa Lerep memiliki alam yang mempesona, masih pula terdapat daerah rawan bencana di beberapa titik yaitu daerah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti terjadinya tanah longsor. Daerah gerakan tanah atau longsor merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor/bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Di wilayah Desa Lerep penyebaran kawasan ini tersebar di Dusun Indrokilo, Dusun Lerep dan Dusun Soka.

Bencana tanah longsor pernah beberapa kali terjadi di Desa Lerep Kabupaten Semarang. Seperti peristiwa yang terjadi di Dusun Indrokilo pada 15 Februari 2017. Sedikitnya enam rumah di dua lokasi di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi terjadinya bencana tersebut maka perlu adanya pembangunan talud penahan tanah. Talud merupakan dinding penahan tanah yang dirancang untuk menahan tanah ke lereng yang tidak secara alami dijaga (biasanya lereng curam, hampir vertikal atau vertikal).

Dalam mengelola pembangunan desa setiap pemerintah desa mengupayakan peningkatan terhadap kinerja pembangunan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam menunjang peningkatan kinerja pembangunan di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, perlu ditunjang dengan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu strategi yang disusun oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan desa, dimana pemerintah juga melibatkan sektor swasta dan kelompok masyarakat didalamnya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam membuat suatu perencanaan pembangunan suatu desa, khususnya pembangunan talud penahan longsor, salah satu unsur penting yang harus terlibat didalamnya adalah masyarakat. Oleh sebab itu salah satu indikator yang mempengaruhi

berhasil tidaknya visi dan Misi suatu pembangunan daerah adalah partisipasi masyarakat. Peran partisipasi masyarakat secara langsung sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal itu sesuai dengan pasal 18 Ayat (7) dan pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama. Untuk melihat apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan talud penahan longsor di desa Lerep terlaksana dengan baik atau tidak, maka pemerintah daerah melaksanakan penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Program ini merupakan suatu proses pelibatan masyarakat dalam memberikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan pada sektor ataupun bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan daerah. Hal ini juga didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dengan prosentase kehadiran hingga 80% dalam kegiatan musrenbang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan di Desa Lerep Kabupaten Semarang).

KERANGKA TEORI

Perencanaan pembangunan terdiri dari dua kata yang berbeda, yakni perencanaan dan pembangunan. Perencanaan adalah proses kontinyu yang terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada hakikatnya, perencanaan adalah upaya untuk menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terarah dan dapat dikontrol, serta dievaluasi. Beberapa pendapat mengenai perencanaan, antara lain pendapat Sondang P Siagian (1983) yang mengatakan bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara itu menurut Pariata Westra (1982) dalam bukunya Ensklopedia Administrasi, mengartikan perencanaan sebagai aktivitas pokok manajemen yang menggambarkan perihal aktivitas kegiatan beserta cara mengerjakannya. Perencanaan merupakan bagian penting untuk kontrol dan evaluasi atas program yang dijalankan.

Amien (2005) menjelaskan beberapa model pendekatan perencanaan yakni:

- Model rasional komprehensif
Model ini menganut doktrin determinisme dan reduksionisme. Pendekatan ini hanya sesuai untuk kondisi di mana sasaran pembangunan terdefinisi dengan baik, serta kondisi lingkungan strategis dapat diprediksi dengan benar. Misalnya penggunaan model *input-output* dalam perencanaan. Terdapat beberapa bidang yang dibagi ke dalam beberapa sektor. Kemudian sektor kembali dibagi ke dalam subsektor dan seterusnya, sehingga diperoleh masalah pembangunan yang terdefinisi dengan jelas. Pada umumnya model ini memiliki kelemahan yang terletak pada asumsinya yang tidak dinamis. Analisis yang dibuat diambil berdasarkan data masa lalu, serta mengasumsikan bahwa data yang diperoleh dapat digunakan untuk memproyeksikan masa depan. Selain itu, kelemahan yang dimiliki dari model ini adalah asumsinya bahwa kondisi dan pengaruh lingkungan strategis dapat dikendalikan atau bahkan diabaikan. Asumsi ini diperuntukkan bagi wilayah perencanaan yang relatif kecil dan terisolasi.
- Model Partisipatif

Model ini menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Setidaknya terdapat tiga pertimbangan, yaitu:

- a) Pengumpulan informasi, kegiatan ini dilakukan agar perencanaan pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil dengan kata lain mengurangi ketidakpastian. Objek yang sama akan memberikan persepsi yang berbeda apabila dilihat oleh dua atau lebih pengamat dengan cara pandang yang berbeda, walaupun dilakukan serentak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi (kebenaran), diperlukan keterlibatan sebanyak mungkin pengamat.
 - b) Menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi Masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan kecil dalam suatu system pada tatanan yang nantinya akan menyebabkan rusaknya system secara keseluruhan. Penyaluran aspirasi masyarakat bukan hanya untuk sekedar memberi “perasaan” namun dengan demikian akan memicu masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi.
 - c) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Diversivitas akan memperkuat tatanan secara keseluruhan, karena gejala-gejala dapat dilokalisasi pada bagian-bagian tatanan, sehingga tatanan secara keseluruhan akan tetap stabil.
- Model Adaptif
Perencanaan adaptif mengintegrasikan keluwesan (fleksibilitas) dan kemampuan responsive (*responsiveness*) pada level perencanaan dan pengambilan keputusan. Model ini senantiasa melakukan modifikasi terhadap rencana pembangunannya agar senantiasa sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Setelah memahami makna perencanaan, perlu juga mengerti pula yang dimaksud pembangunan. Menurut Sondang P Siagian (1983) pembangunan yaitu : “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai upaya yang dilakukan demi mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk kearah yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah suatu konsep yang luas dengan beragam konteks, penerapan dan definisi (Moggani, 2001; O’Mara-Eves,, 2013). Bagi sebagian kalangan partisipasi dimaknai sebagai “prinsip dalam berinteraksi sosial”, sementara kalangan lain menganggapnya sebagai “praktik” di dalam berhubungan dan berinteraksi sosial (O’Mara-Eves,, 2013). Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat di dalam suatu proyek untuk menyelesaikan problem/masalah tertentu (Wasilwa C., 2015). Pada konteks penelitian ini, partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan warga Desa Lerep di dalam proses perencanaan dan pembangunan talud penahan longsor.

Partisipasi melibatkan serangkaian kegiatan seperti: berbagi informasi, konsultasi, berdebat atau berargumentasi, dan pemberdayaan. Warga setempat dapat

berpartisipasi selama proses penilaian kebutuhan, perencanaan, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi proyek. Pada praktiknya, tidak setiap warga dapat berpartisipasi karena di dalam stratifikasi sosial selalu terdapat kelompok elit yang memiliki akses dan pengaruh lebih besar di dalam pengambilan keputusan daripada sebagian besar anggota masyarakat marjinal. Partisipasi masyarakat harus dimaknai dan dirasakan sebagai keterlibatan di dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan.

Partisipasi dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat supaya manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004). Menurut Mubyanto (1997), partisipasi diartikan sebagai sebuah kondisi di mana pembuat keputusan memberi ruang kepada masyarakat ikut serta terlibat pada proses pembangunan dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Berdasarkan pengertian di atas, pada intinya partisipasi adalah mengikutsertakan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam tahapan pembangunan. Wujud keikutsertaannya bisa berupa usulan, kritikan, maupun dalam bentuk barang dan jasa. Partisipasi menjadi bagian dari proses demokratisasi pembangunan wilayah, termasuk pembangunan desa.

Bentuk Partisipasi

Partisipasi menurut Efendi, bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi (2005), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi non fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan seperti usaha-usaha pembangunan rumah, pembangunan jalan, membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum (2011) Faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat adalah:

1. Aspek-aspek tipologis
 2. Sifat malas, tidak mau tau dan juga apatis terhadap perubahan di lingkungan masyarakat
 3. Geografis (Pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
 4. Demografis (Jumlah penduduk)
 5. Ekonomi (Desa miskin atau tertinggal)
- Ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi:
- a. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan wadah untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna tempat saja tetapi juga forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak mewedahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Melemahnya modal sosial

Modal sosial merupakan serangkaian jaringan atau organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil dan lain sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum (2011) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program, sifat faktor-faktor ini bisa mendukung program yang sukses, tetapi ada juga sifat dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya, faktor usia, yang terbatas properti, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Angell mengatakan bahwa partisipasi berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan masyarakat yang ada. Orang dari kelompok usia menengah dengan lampiran moral terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang lebih stabil, cenderung lebih mungkin untuk berpartisipasi dibandingkan kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai panjang dominan dalam budaya berbagi bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya sebagai wanita adalah “di dapur” yang berarti bahwa di banyak masyarakat peran perempuan, terutama mengurus rumah tangga, tetapi nilai bagi peran perempuan telah bergeser oleh gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan, semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan salah satu syarat mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Memahami bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana ekonomi yang stabil.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Semakin lama masyarakat tinggal di lingkungan

tertentu, akan mempengaruhi partisipasi seseorang. Rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasi besar dalam aktivitas apapun yang lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta studi kasus. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian, dan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen notulensi usulan masyarakat desa, jurnal-jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, berita di media cetak, media elektronik atau online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan temuan-temuan dan hasil - hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil temuan data baik melalui wawancara mendalam dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan Talud Penahan Longsor di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Perencanaan Partisipatif Dalam Proses Pembangunan Talud Penahan Longsor Desa Lerep

Dalam membuat suatu perencanaan pembangunan suatu desa, khususnya pembangunan talud penahan longsor, salah satu unsur penting yang harus terlibat didalamnya adalah masyarakat. Oleh sebab itu salah satu indikator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi dan misi suatu pembangunan daerah adalah partisipasi masyarakat, dimana masyarakat berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa keterlibatan masyarakat dan pihak swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembangunan desa, maka visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya akan sulit tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Terlibatnya masyarakat melalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungan substantive dimana keputusan yang akan diambil lebih efektif. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam hal proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memberikan nilai strategis bagi masyarakat. Hal itu menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengukur perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan berjalan dengan baik atau tidak, maka pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Program ini merupakan suatu proses pelibatan masyarakat dalam memberikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan tiga indikator yaitu (1) Pengumpulan informasi; (2) Menyalurkan aspirasi masyarakat; serta (3) Diversivitas proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan talud penahan longsor di Kabupaten Semarang khususnya di Desa Lerep sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Pengumpulan Informasi

Proses pengumpulan informasi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi dengan kata lain kegiatan ini dilakukan agar tingkat keberhasilan dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu pengumpulan informasi ini difokuskan untuk dapat penampung sebanyak-banyaknya informasi (kebenaran) yang nantinya akan dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan. Proses pengumpulan informasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah tingkat desa untuk membentuk panitia penyelenggaraan penyusunan RPJMD dan pembuatan jadwal pelaksanaan musrenbang desa untuk dapat disampaikan kepada masyarakat.

Proses pengumpulan informasi pada perencanaan pembangunan di Desa Lerep dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses Pengumpulan Informasi



Sumber: Diolah dari data peneliti

Musrenbang desa yang dibuat dan dihadiri oleh masyarakat merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Pada kegiatan ini informasi terkait permasalahan pembangunan di lingkungan Desa Lerep akan diperoleh. Perangkat Desa juga memberikan saran atau pendapat mereka terkait dengan pembangunan apa yang seharusnya dilakukan di Desa Lerep agar pembangunan yang akan direalisasikan lebih tepat sasaran dan dana yang digunakan lebih efektif dalam penggunaannya. Hal ini dimaksudkan agar ketika kebijakan telah dibuat maka tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.

Proses demokrasi dalam perencanaan pembangunan akan lebih terlihat apabila sejak awal masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi. Menurut Amien (2005) Pengumpulan sebanyak mungkin informasi sangat berpengaruh terhadap faktor keberhasilan, dengan kata lain semakin banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan musrenbang desa maka informasi mengenai pembangunan tersebut akan lebih banyak didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lerep dalam program perencanaan pembangunan bersama pemerintah desa telah

terlihat. Masyarakat Desa Lerep sangat antusias dalam mengikuti rembung dusun maupun musrenbang di tingkat desa. Masyarakat secara aktif turut serta dalam memberikan pendapat, saran, maupun kritikan terkait permasalahan perencanaan pembangunan. Disisi lain tingkat kehadiran dari keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang telah mencapai 80% dari undangan yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara.

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Dalam proses perencanaan pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Amien (2005) menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat sangat ditentukan oleh transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya penyaluran aspirasi, masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Semua aspirasi masyarakat dapat disalurkan oleh pemerintah tingkat desa melalui kegiatan musrenbang dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Dalam hal ini penyaluran aspirasi masyarakat Desa Lerep diwujudkan melalui musyawarah desa. Musyawarah ini dibagi menjadi beberapa tingkatan mulai dari lingkup yang terkecil yaitu pada saat pertemuan rutin RT/RW di masing-masing wilayah.

Proses Penyaluran Aspirasi



Sumber: Diolah dari data peneliti

Setelah masyarakat dari masing-masing RT/RW menentukan beberapa prioritas perencanaan program, maka usulan tersebut kembali dibahas bersama dengan kepala dusun setempat. Musyawarah dusun ini dipimpin langsung oleh Kepala Dusun dan dihadiri oleh Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), Anggota KPMD, dan juga perwakilan warga dusun tersebut untuk menyampaikan hasil aspirasi warga di masing-masing RT/RW.

Setelah proses musyawarah ditingkat dusun selesai, maka pada tahap Musrenbang Desa agenda ini akan langsung dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Ketua KPMD, Kepala Dusun, Modin (Pemangku adat/Agama), Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan beberapa perwakilan warga dari masing-masing Dusun. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan di Desa Lerep beserta menyiapkan pula anggaran dana pembangunannya sesuai dengan Informasi Perencanaan program yang telah diajukan oleh masyarakat.

Dari beberapa usulan aspirasi dan keluhan masyarakat maka warga Desa Lerep mengusulkan diantaranya adalah pembangunan talud di pinggir jalan. Pembangunan ini dimaksudkan agar saat longsor talud penahan longsor tidak jebol dan meminimalisir kecelakaan pada warga Desa Lerep. Ini selaras dengan keluhan masyarakat bahwa terjadinya longsor membuat resah warga karena seringkali terdapat beberapa titik di

Desa Lerep mengalami jebol sehingga mengakibatkan akses kegiatan masyarakat terganggu.

Aspirasi masyarakat dapat dinilai berhasil tersalurkan dengan benar apabila hasil dari musrenbang merupakan cerminan dari apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga usulan tersebut menjadi program prioritas pembangunan. Berdasarkan temuan dilapangan hal ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Lerep yang mana pembangunan talud merupakan salah satu usulan dari masyarakat desa untuk dijadikan prioritas pembangunan.

Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Amien (2005) teori perencanaan partisipatif mempertimbangkan wujud diversivitas proses pengambilan keputusan. Hal itu terkait keanekaragaman keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan program-program yang akan dilaksanakan pada suatu wilayah tertentu.

Dalam temuan hasil dilapangan, proses pengambilan keputusan beberapa elemen masyarakat Desa Lerep telah diikutsertakan/ ikut terlibat secara aktif dalam perencanaan pengembangan desa pada tingkat musdus. Sedangkan untuk tingkat di atasnya masyarakat diwakili oleh perangkat pemerintah yang berwenang. Dalam Musyawarah Dusun, keaktifan masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan yang ada di Desa Lerep. Kehadiran RT, RW, dan perwakilan warga dalam musdus dapat memberikan usulan-usulan yang akan disampaikan ketika Musrenbang Desa dan nantinya akan disampaikan dalam musrenbang ditingkat Kecamatan.

Dalam upaya mendorong masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam penyusunan dana desa, pemerintah desa sudah menghimbau kepada semua masyarakat Desa Lerep untuk ikut serta dalam terselenggaranya musdus, dengan cara membuat musyawarah kecil tingkat RT dan RW serta ada peran PKK.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang sering mempengaruhi sebuah proses perencanaan pembangunan juga perlu diperhatikan. Dari hasil perencanaan pembangunan Talud Penahan Longsor di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dapat dilihat faktor-faktor pendukung keberhasilan dan factor-faktor penghambat partisipatif masyarakat, diantaranya:

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Koordinasi yang baik antar warga dengan perangkat desa. Dalam hal ini yakni kegiatan sosialisasi. Pemerintah Desa Lerep berkomunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan musyawarah yang diadakan di kantor Balai Desa Lerep. Hal itu dilaksanakan untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan sosialisasi dilakukan tentunya dengan harapan agar lama-kelamaan masyarakat bisa menumbuhkan sendiri sifat partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan.
2. Keaktifan masyarakat. Masyarakat yang secara aktif turut serta memberi usulan dan membantu pemerintah desa untuk merealisasikan rencana program pembangunan.

3. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam gotong-royong. Masyarakat secara sukarela memberi sumbangan berupa tenaga dan iuran dana terhadap rencana pembangunan yang akan direalisasikan.
4. Adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata bertambah jika turut berperan dalam pengambilan keputusan.

Faktor-faktor penghambat Program Pembangunan Desa

Dalam pengelolaan program desa, tidak terlepas dari beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Lerep, yaitu:

1. Jangkauan wilayah yang sangat luas. Lingkungan Desa Lerep yang sangat luas membuat program perencanaan menjadi banyak, sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam memilih prioritas rencana pembangunan.
2. Kesibukan masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakhadiran masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Kurangnya fasilitas yang memadai. Masyarakat masih menggunakan peralatan seadanya, sehingga hal ini dapat menghambat proses perencanaan pembangunan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini perencanaan partisipatif dapat ditinjau melalui tiga indikator yaitu adanya pengumpulan informasi, penyaluran aspirasi masyarakat dan diversivitas pengambilan keputusan. Penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Lerep Kabupaten Semarang ini berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan masyarakat. Pembangunan yang terjadi selama anggaran tahun tersebut digunakan salah satunya untuk pembangunan talud penahan longsor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat dan sivitas lainnya turut serta berpartisipasi dalam setiap tahap perencanaan pembangunan,
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pada perencanaan pembangunan talud penahan longsor di Desa Lerep Kabupaten Semarang antara lain:
 - a) Faktor pendukung antara lain koordinasi yang baik antar warga dengan perangkat desa, keaktifan masyarakat, tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam gotong-royong dan adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.
 - b) Faktor penghambat antara lain: Jangkauan wilayah yang sangat luas, kesibukan masyarakat serta kurangnya fasilitas yang memadai sehingga dapat menghambat proses perencanaan pembangunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Lerep dan juga Pemerintah dalam rangka meningkatkan perencanaan partisipatif pembangunan talud penahan longsor. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan keterbukaan dalam bentuk komunikasi dua

arah kepada masyarakat, harus lebih berupaya untuk merangsang dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan sivitas lain dalam pelaksanaan musyawarah, khususnya musyawarah dusun dan rapat diakhir tahun, meningkatkan peran masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah dalam merealisasikan program kegiatan, senantiasa memberikan edukasi kepada warga melalui sosialisasi yang diberikan untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam mensukseskan setiap program pembangunan dan juga lebih meningkatkan system transparansi kepada publik agar tidak terjadi kesalah pahaman antar warga dengan pemerintah.

Selain itu, masyarakat diminta untuk lebih peka dalam memandang permasalahan yang terjadi di wilayah mereka terkait program yang dibutuhkan, program yang harus diprioritaskan, dan terutama berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amien, Mappadjantji, 2005, Kemandirian Lokal “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”, PT. Gramedia, Jakarta

Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Dwiningrum. Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka belajar.

Mubyarto et, al, 1997. *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan*. Yogyakarta: Aditya Media

Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Westra, Pariata. 1982. *Ensklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

Willie Wijaya. 2004. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Semarang: Bintang Jaya

Jurnal

O'mara-ves, Alison, et. al. 2013. Community Engagement to Reduce Inequalities in Health: a Systematic Review, Meta-analysis and Economic Analysis. National Institute for Health Research.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Skripsi

Rahman, Sitti Nurfatimah. 2016. *Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*. Universitas Hasanuddin.

Ulya, Afwah. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. UIN Walisongo Semarang.

Sumber Internet

Kompas.com di unduh dari

<https://regional.kompas.com/read/2017/02/15/22175971/6.rumah.di.ungaran.tertimpa.longsor.penghuninya.mengungsi?page=all> pada tanggal 12 Januari 2020